BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai sosial. Hukum membantu menjaga keadilan dan ketertiban dengan memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dalam masyarakat sesuai dengan berkembangannya fenomena dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana pendapat Nurahma dan Fahmi bahwa:

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur segala tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dipaksakan dengan adanya sanksi. Keberadaan hukum akan mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban.¹

Keberadaan hukum dalam suatu negara untuk memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara.² Oleh karena itu, setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan menentukan kemajuan suatu bangsa, dimana semakin tinggi ketaatan hukum warga negara akan semakin tertib kehidupan masyarakatnya. Keberadaan hukum di Indonesia juga digolongkan dalam beberapa bentuk, salah satunya

¹ Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review Etika*)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 768-769, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622>

² Prayoga, S.R., S. Lasmadi, dan M. Rapik, "Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 5, Nomor 1, 2024, hlm. 15, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31796/17592>

adalah hukum publik yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Fai Abdullah fungsi dari hukum pidana sebagai berikut:

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.³

Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana atau yang disebut dengan tindak pidana, termasuk untuk penegakan hukum.⁴ Saat ini bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dipidana juga semakin bervariasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, salah satu bentuk perbuatan yang dapat dipidana adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Menurut Agus Nugroho bahwa:

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa, dimana kendaraan bermotor terlibat dalam insiden yang menyebabkan kerusakan, cedera atau kematian. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut. Kecelakaan lalu lintas termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, apabila tidak memenuhi unsur-unsur berkendara dengan baik.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sangat jelas disebutkan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Ketentuan

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5

⁴ Daulay, N.R., Hafrida., dan Y. Monita, "Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Wilayah Kota Jambi", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 4, Nomor 3, 2023, hlm. 302, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28736/16866>

⁵ Agus Nugroho, *Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan*, Kementerian PUPR, Jakarta, 2016, hlm. 7

hukum dari Undang-Undang tersebut.⁶ Selain itu pengaturan kecelakaan lalu lintas juga dapat berpedoman pada pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”. Selanjutnya Pasal 360 KUHP mengatur bahwa: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun”. Kedua aturan dalam KUHP ini dapat digunakan untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka berat.

Adanya aturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas ini juga mendukung pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan yang optimal. Hal ini dikarenakan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.⁷

Kecelakaan lalu lintas dapat melibatkan siapapun, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua atau yang biasa disebut dengan sepeda motor. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua ini dikarenakan adanya hal, baik itu akibat *human error* atau kesalahan pengguna, kondisi lingkungan dan lain

⁶ Rauf, A., N. Arfa, dan E. Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 99, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/12686/10904/34606>

⁷ Anggraeni, U.A., Hafrida, dan Nys. Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 60, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9839/10255/30083>

sebagainya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua dapat menimbulkan kerugian, baik itu kerugian dari segi materi maupun korban jiwa, seperti korban luka berat, luka ringan, bahkan meninggal dunia.

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua sering kali tidak konsisten, dimana ada beberapa kasus kecelakaan yang diselesaikan melalui proses pengadilan, tapi adapula kasus yang diselesaikan melalui luar pengadilan yaitu melalui proses perdamaian diantara kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia juga tetap dilakukan proses perdamaian dengan penyelesaian kasusnya melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi antara korban dan terdakwa. Tujuan dari adanya *restorative justice* ini adalah untuk memulihkan korban, memulihkan pelaku, dan memulihkan masyarakat melalui cara yang disepakati bersama.⁸

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa:

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan
- b. Kepentingan umum
- c. Proporsionalitas
- d. Pidana sebagai jalan terakhir
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

⁸ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Works*, Jessica Kingsley Publisher, London, 2007, hlm. 25

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diatur bahwa perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan peraturan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, maka kriteria dari pendekatan *restorative justice* ini adalah ini hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan jumlah kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur. Kriteria selanjutnya adalah dilakukan berdasarkan ketersediaan kedua belah pihak yang berperkara, bebas dari paksaan, prosedur yang adil dan transparan, melibatkan pihak yang netral dan terlatih, fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan, serta berfokus untuk melindungi hak korban.

Pendekatan *restorative justice* juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa:

- Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal.
 - b. Penyelidikan
 - c. Penyidikan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur mengenai syarat-syarat penyelesaian tindak pidana dengan

pendekatan *restorative justice*, salah satunya adalah berkaitan dengan hak korban dan tanggungjawab pelaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa:

Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang.
- b. Mengganti kerugian.
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka *restorative justice* adalah suatu metode yang secara filosofi dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil maupun kerugian immateriil.⁹ Kerugian materil adalah suatu kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh seseorang, contohnya dapat berupa musnah atau berkurangnya properti yang dapat dinilai dengan uang akibat suatu tindak pidana, sedangkan kerugian immateriil menurut hukum adalah suatu kerugian yang tidak bisa dibuktikan secara nyata, sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung nilainya berdasarkan uang.¹⁰

⁹ Rian Van F.K dan T.C. Rafael, Harapan vs Kenyataan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 281, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/205/226>

¹⁰ *Ibid.*

Terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, maka pendekatan *restorative justice* juga sering digunakan. Secara normatif memang belum ada norma yang secara langsung menyatakan mengenai penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*, tetapi dalam hal ini penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan *restorative justice* ini biasanya digunakan pada saat proses penyidikan, dimana pihak korban dan pelaku akan saling berdamai dengan persyaratan memberikan ganti rugi terhadap pihak korban. Sebenarnya pendekatan *restorative justice* ini sah-sah saja untuk dilakukan dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa *restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan.

Akan tetapi jika dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dan terbukti karena kelalaian pelaku, maka proses perdamaian melalui pendekatan *restorative justice* seharusnya tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku. Artinya pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sanksi pada Pasal

310 Ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun sebagian besar fakta yang terjadi adalah banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua justru diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, meskipun kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian pelaku atau bahkan korban sampai meninggal dunia.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua dengan pendekatan *restorative justice* juga banyak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi). Berdasarkan data dari Polresta Jambi bahwa selama tahun 2022 sampai 2024 telah terjadi 852 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua. Adapun rincian jumlah perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan jumlah korban sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Perkara Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Jambi Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Korban			Total
	MD	LB	LR	
2022	37	2	280	319
2023	49	0	355	404
2024	13	0	116	129
Total	99	2	751	852

Sumber : Polresta Jambi (2024)

Keterangan : MD = meninggal dunia, LB = luka berat, LR = luka ringan

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 852 kasus maka paling banyak korban luka ringan yaitu 751, meninggal dunia 99 kasus dan luka berat sebanyak 2 kasus. Penyelesaian kasus tersebut juga beranekaragam, salah satu

upaya penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan yaitu melalui *restorative justice*. Dari 852 kasus, maka sebanyak 498 kasus diselesaikan melalui *alternative dispute resolution restorative justice* (ADR RJ). Penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* ini sebesar 87,15% (434 kasus) diberikan kepada korban luka ringan dan luka berat, serta 12,85% (64 kasus) kepada korban yang meninggal dunia.¹¹ Syarat yang digunakan adalah kesepakatan antara korban dan pelaku, serta ketersediaan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditanggung pelaku.

Berdasarkan hal tersebut maka upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan atas persetujuan kedua belah pihak. Bahkan alternatif *restorative justice* ini tidak hanya digunakan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan atau kerugian minimal, tetapi juga diterapkan jika korban meninggal dunia dan menimbulkan kerugian berat dengan syarat adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Setelah adanya *restorative justice* tersebut, maka pelaku tidak akan dikenakan tuntutan pidana dan masalah dianggap telah selesai. Apabila melihat dari hal ini, maka secara *das sollen* pelaku seharusnya tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan sanksi pada Pasal 310 Ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam fakta atau *das sein* justru pelaku tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana mestinya, sehingga terjadi

¹¹ Data Jumlah Laka Lantas dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas di Polresta Jambi Tahun 2022-2024

kesenjangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan pemenuhan hak korban kecelakaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi?
2. Apa sajakah kendala dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian pada skripsi ini:

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang dasar penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecah masalah yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini membantu mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep yang relevan yang terkait dengan penelitian. Hal ini membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dan memandu penyusunan metodologi penelitian serta analisis data.

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana. “Penyelesaian tindak pidana dapat diartikan

sebagai beragam cara atau upaya yang ditempuh untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu perkara pidana”.¹²

2. Kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “kecelakaan lalu lintas merujuk pada kejadian tak terduga dan tak disengaja di jalan yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kerugian manusia atau harta benda”.

3. Kendaraan Roda Dua

Kendaraan roda dua adalah kendaraan bermotor, dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa; “kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Kendaraan roda dua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sepeda motor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

¹² Rozi Mindes, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 24

4. *Restorative Justice*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah: "Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Restorative justice atau dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti keadilan restoratif sebagai suatu metode atau cara penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban oleh pelaku agar tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku tidak lagi diselesaikan melalui proses hukum lebih lanjut.¹³

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi adalah suatu upaya untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor melalui metode atau cara penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban oleh pelaku.

¹³ A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia – Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2016, hlm. 13

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Tujuan hukum sebagai kepastian dicapai untuk keadilan dari hukum itu sendiri¹⁴. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku dan tidak boleh menyimpang.¹⁵ Kepastian hukum dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan dituntut pasti dipatuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak serta dikenakan sanksi hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang

¹⁴ Dwika, *keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.18

¹⁵ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, *Filsafat Hukum & Paradigma Moderanisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Pubishing, Solo, 2018, hlm.202.

¹⁶ Dwika, *Loc.Cit.*

diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹⁸ Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.¹⁹

2. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai

¹⁷ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Loc.Cit.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

¹⁹ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.²⁰

Selanjutnya Hafrida dan Usman juga menjelaskan bahwa:

Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.²¹

Tujuan *restorative justice* adalah untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan (harm).

Keadilan Restoratif mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya peluang untuk melakukan upaya terbaik. Ganti kerugian merupakan suatu bentuk kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap korban. Dengan demikian keadilan restoratif lebih mengutamakan perbaikan dan keadilan bagi korban sehingga melalui keadilan restoratif dapat dihindarkan akibat yang lebih buruk.²²

Restorative justice dilandaskan pada teori *retribution* yang bertujuan untuk pemasyarakatan terpidana melalui rehabilitasi sehingga pemidanaan yang diterapkan memiliki tujuan yang terintegrasi antara pembalasan terhadap perbuatan pelaku tetapi juga memiliki tujuan sebagai sarana agar dapat melakukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Walaupun demikian teori rehabilitasi ini pada akhirnya mendapatkan kritik karena baik pada

²⁰ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 1

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 4

prinsip retributif maupun rehabilitatif tujuan pemidanaan masih semata-mata terfokus pada pelaku tindak pidana.²³

Dasar pemikiran yang demikianlah yang kemudian menjadi dasar dalam teori "*Restorative Justice*". Di mana dalam prinsip dalam keadilan restoratif pengembalian penyelesaian konflik kepada pihak-pihak yang terdampak yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas merupakan tujuan yang diutamakan. Dengan demikian keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenali dampak dari tindak pidana berupa ketidakadilan yang dialami korban. Sehingga secara sederhana melalui keadilan restoratif dapat memberikan keadilan formal kepada korban.²⁴

Selain itu prinsip keadilan yang memperbaiki ke keadaan semula juga berupaya mengembalikan rasa aman korban, kerugian korban, martabat pribadi, terutama menumbuhkan perasaan korban yang merasa mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam proses peradilan atas peristiwa yang telah terjadi padanya. Oleh sebab itu dalam keadilan *restoratif* diupayakan membangun kemitraan bersama sebagai respons konstruktif memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.²⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Salah satu perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, dimana hukum pidana ini dibagi

²³ *Ibid.*, hlm. 20

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21

²⁵ *Ibid.*

berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perbuatan pidana ringan dan perbuatan pidana berat.²⁶

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara.²⁷ Oleh karena itu, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicitakan oleh hukum itu sendiri.²⁸

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁹

²⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 38

²⁷ *Ibid.* hlm. 39

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan.³⁰

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.³¹

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.³² Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2

³¹ Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544>, hlm. 87

³² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel.
Orisinalitas Penelitian.

1.	Nama	Neni Vesna Madjid dan Tegar Ariwibawa
	Judul	Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu lintas Berat Dengan Pendekatan Restoratif ³³
	Persamaan	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan <i>restorative justice</i>
	Perbedaan	Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada kecelakaan lalu lintas berat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua
2.	Nama	Fandika Wahyu Ramadhani dan Suyatna
	Judul	Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

³³ Neni Vesna Madjid dan Tegar Ariwibawa, Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat Dengan Pendekatan Restoratif, *Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Nomor 1, 2024, <https://www.swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/500/367>

	2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ³⁴
Persamaan	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan <i>restorative justice</i>
Perbedaan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji secara normatif mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan <i>restorative justice</i> berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara empiris terkait penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan <i>restorative justice</i> .

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menurut Sigit Sapto Nugroho dkk, penelitian yuridis empiris adalah:

³⁴ Fandika Wahyu Ramadhani dan Suyatna, Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1, Nomor 4, 2024, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/download/2185/2172>

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.³⁵

Pada penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi, serta dasar pertimbangan Polresta Jambi dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Unit Laka Lantas Polresta Jambi yang beralamat di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 01, Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian yuridis empiris umumnya menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama, selain data sekunder atau kepustakaan.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan

³⁵ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

³⁶ *Ibid.*, hlm. 60

skripsi ini.³⁷ Penggunaan data primer menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data.³⁸ Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis. Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.³⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, dokumentasi dan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61

³⁹ *Ibid.*, hlm. 62

observasi.⁴⁰ Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.⁴¹ Selanjutnya Sigit Sapto Nugroho dkk, menjelaskan bahwa:

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴²

Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi, serta dasar pertimbangan Polresta Jambi dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 70-71

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 71

⁴² *Ibid.*

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.⁴³ Observasi dapat dilakukan oleh observer (pengamat) terhadap observée (objek yang diamati) dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini merupakan suatu pengamatan di mana observer benar-benar ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian.⁴⁴

Pada dasarnya observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, untuk mengumpulkan data yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti. Dokumen ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁴⁵ Sampel adalah contoh dari suatu populasi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 78

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 79

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 81

atau subpopulasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.⁴⁶

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria berdasarkan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki tugas, jabatan dan kewenangannya untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Unit Laka Lantas Polresta Jambi sebanyak 1 orang.
- b. Korban Laka Lantas di Polresta Jambi sebanyak 2 orang.
- c. Pelaku Laka Lantas di Polresta Jambi sebanyak 2 orang.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴⁷

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 82

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 93

objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴⁸ Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi, serta dasar pertimbangan Polresta Jambi dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.

I. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti telah membentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok pembahasan penulis pada penulisan skripsi ini, selain itu pada bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas dan *restorative justice*. Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara umum, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*, serta jenis-jenis pelanggaran kendaraan bermotor.

⁴⁸ *Ibid.*

BAB III PEMBAHASAN, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice* di Polresta Jambi, serta dasar pertimbangan Polresta Jambi dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kendaraan roda dua melalui *restorative justice*.

BAB IV PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab ketiga, serta saran yang menyangkut objek permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Kesimpulan dan saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi.